



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GABRIEL SIALLAGAN**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **656192**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.205.000.000

1. Tanah Seluas 3825 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
2. Tanah Seluas 2520 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 484 m2/100 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 855.000.000
4. Tanah Seluas 8670 m2 di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah Seluas 8670 m2 di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
6. Tanah Seluas 458 m2 di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
7. Tanah Seluas 2240 m2 di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
8. Tanah Seluas 7821 m2 di KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 279 m2/180 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 130.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG LGX Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ TYPE A Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000



3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
4. MOTOR, YAMAHA 2015 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.359.500.000
III. HUTANG	Rp.	1.450.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.909.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.